

Kalah Pilpres 2019,

PAN Sebut Contoh Capres di Amerika Serikat

Reporter: **Irsyan Hasyim (Kontributor)**

Editor: **Francisco Rosarians Enga Geken**

Kamis, 6 Juni 2019 09:07 WIB



Tim Hukum BPN mendaftarkan gugatan hasil Pilpres 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat, 24 Mei 2019.

Jakarta- Wakil Ketua Umum [Partai Amanat Nasional](#) (PAN), Bara Hasibuan mengatakan, rekonsiliasi politik dapat terjadi jika koalisi yang kalah dalam Pemilihan Umum Presiden atau [Pilpres 2019](#) dapat menerima dan menghormati keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal ini juga dapat dicontoh dari dinamika politik yang dilakukan para tokoh dan calon presiden di Amerika Serikat.

"Bangsa ini harus tetap satu setelah berkompetisi yang begitu ketat," kata Bara di Jalan Widya Chandra, Jakarta Selatan, Rabu, 5 Juni 2019.

BACA: [Prabowo Tolak Rekapitulasi KPU yang Menangkan Jokowi](#)

Dia mengatakan, Calon Presiden Amerika Serikat, Hillary Clinton tetap mengucapkan selamat kepada kompetitornya Donald Trump yang memenangkan Pilpres 2016. Hillary tetap berkomunikasi dengan Trump meski dia dan tim pemenangannya mengantongi data kepopuleran yang tinggi dalam pemilihan tersebut.

"Jadi rekonsiliasi itu dimulai dari situ," ucap dia.

BACA: [Soal Pertemuan dengan Jokowi, Prabowo: Semua Ada Waktunya](#)

Tradisi juga terjadi pada perebutan kursi presiden Negeri Paman Sam di

periode-periode sebelumnya. Bara mengatakan, pada Pilpres 2000, Capres Al Gore mengajukan sengketa hasil pemungutan suara ke Mahkamah Agung Amerika Serikat.

Pada saat itu, Mahkamah menolak permintaan Al Gore untuk pemungutan suara ulang di Negara Bagian Florida. Mahkamah mengukuhkan kemenangan saingan Al Gore, George Bush.

"Al Gore tetap melakukan pidato namanya consensus speech. Pidato mengakui kekalahan dan memberikan selamat kepada Bush secara terbuka " kata Bara.

Menurut dia, tradisi ini juga harus mulai dilakukan pada Pilpres 2019. Dia menilai, partai-partai yang menjadi koalisi Prabowo dan koalisi Jokowi harus sama-sama menerima hasil rekapitulasi KPU.

"Pihak yang kalah harus bisa bersikap harus bisa berbesar hati menerima hasil tersebut walaupun pahit dan menghormati hasil tersebut. Ini yang belum kita lihat di Indonesia," kata dia.

BACA: [Pertemuan Jokowi-Prabowo, Moeldoko: Tunggu Momen yang Tepat](#)

Sengketa Pilpres 2019,

PAN Minta Bambang Widjojanto Tak Serang MK

Reporter: **Irsyan Hasyim (Kontributor)**

Editor: **Fransisco Rosarians Enga Geken**

Kamis, 6 Juni 2019 09:23 WIB



Ketua Tim Hukum BPN, Bambang Widjojanto, mendaftarkan gugatan sengketa hasil Pemilihan Presiden 2019 di MK, Jakarta, Jumat, 24 Mei 2019. Tim Prabowo-Sandi yang hadir di antaranya Hashim Djojohadikusumo, dan Denny Indrayana. TEMPO/Muhammad Hidayat

Jakarta- Wakil Ketua Umum [Partai Amanat Nasional](#) (PAN), Bara Hasibuan menilai, proses hukum dalam perkara sengketa hasil Pemilihan Umum Presiden 2019 atau Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi harus dihormati. Hal ini terutama menjelang pelaksanaan sidang perdana perselisihan hasil pemilu (PHPU).

"Bambang Widjojanto (Ketua Tim Hukum pasangan [Prabowo Subianto](#)-Sandiaga Uno) dalam berbagai kesempatan selalu statemennya melecehkan Mahkamah Konstitusi. Padahal mereka sudah memutuskan untuk mengajukan perkara ke MK," kata Bara di Jalan Widya Chandra, Jakarta, Rabu, 5 Juni 2019.

BACA: [Prabowo Tolak Rekapitulasi KPU yang Memenangkan Jokowi](#)

Menurut dia, pilihan kubu Prabowo untuk memakai jalur konstitusi percaya pada kemampuan Mahkamah Konstitusi untuk bersikap imparial, independen, dan fair. Dia menilai, Kubu Prabowo sangat janggal jika memutuskan bersengketa ke MK tetapi justru melecehkan tempat yang menjadi langkah mencari keadilan tersebut.

"Konsentrasi pada fakta-fakta hukum. Jangan terus menerus mendiskreditkan, mendelegitimasi dan melecehkan Mahkamah Konstitusi," kata Bara.

BACA: [Kubu Prabowo Ajukan Gugatan ke MK](#)

Sebelumnya, Bambang Widjojanto menyatakan agar MK bisa menempatkan dirinya menjadi bagian penting, dimana kejujuran dan keadilan harus menjadi watak dari kekuasaan. "Dan bukan justru menjadi bagian dari satu sikap rezim yang korup," kata Bambang.

BACA: [Bambang Widjojanto jadi Kuasa Hukum Prabowo, Anies: Cuti](#)